

BIAR PAD TIDAK MENURUN

Kabupaten Bogor Lakukan 4 Relaksasi Pajak

CIBINONG (IM)- Untuk memaksimalkan raih pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) melaksanakan empat program relaksasi pajak.

Empat program relaksasi pajak tersebut ialah pemberian diskon 25 persen untuk pembayaran piutang Tahun 2011 dan sebelumnya, penghapusan sanksi administratif atau denda terhadap piutang pajak 2020, pemberian diskon 10 persen untuk pembayaran masa pajak Tahun 2020 dan pembebasan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHHTB) yang biayanya di bawah Rp 50 ribu.

"Empat program relaksasi pajak di atas berlaku mulai 4 Januari hingga 31 Maret 2021, harapannya ada peningkatan pembayaran pajak di triwulan pertama dan berkurangnya piutang pajak di tengah masa pandemi Covid 19," ujar Kepala Bappenda Bogor, Anif Rachman kepada wartawan, Senin, (1/2).

Dia menambahkan piutang pajak hingga Tahun 2020 lalu mencapai Rp 1,5 hingga 1,6 triliun dan ia menghimbau agar masyarakat membayar piutang pajak tersebut di triwulan pertama Tahun 2021 ini.

"Kami imbau agar pro-

gram empat relaksasi pajak ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para piutang pajak, karena Bappenda memberikan diskon hingga 25 persen," tambahnya.

Arif menuturkan karena Bumi Tegar Beriman terpengaruh pandemi Covid 19 maka target raih PAD baik murni dari pendapatan pajak daerah atau sumber lainnya diperkirakan bakal menurun.

"Target raih pendapatan murni dari pajak daerah Tahun 2020 Rp 1,8 dan angka ini kami juga targetkan di tahun 202, jika tahun lalu total PAD sebesar Rp 2,7 triliun kami memperkirakan di tahun ini menurun menjadi Rp 2,6 triliun," tutur Arif.

Diwawancarai terpisah, Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku belum mengetahui apakah PAD di Tahun 2021 bakal turun, namun ia optimis dengan empat program relaksasi pajak maka menstimulus pembayaran pajak dan piutang pajak.

"Dengan relaksasi pajak maka yang nunggak dan banyak duitnya pada bayar, kalau yang kurang punya duit diringankan karena adanya pembebasan diskon. Dengan empat program relaksasi pajak udah-mudahan raih PAD Kabupaten Bogor tidak turun," ucap Ade Yasin. ● **gio**

16 Warga Gugat Lahan Taman Panca Karsa Cibinong Bogor

CIBINONG (IM)- Selaku kuasa hukum 16 orang warga, Oteu Herdiansyah akan menggugat lahan Taman Panca Karsa di Jalan Raya Tegar Beriman Kelurahan Tengah, Cibinong, Kabupaten Bogor. Pasalnya, 16 orang warga tersebut mengaku memiliki lahan seluas 1,3 hektare tersebut setelah membelinya dari ahli waris H Iyag pada 1980-an.

Oteu menyebutkan, para penggugat memiliki barang bukti akte jual beli (AJB) yang ditandatangani Lurah Tengah dan Camat Cibinong pada 2004-2005 lalu. Dia mengatakan, di tengah ancaman gugatan sengketa lahan itu Pemkab Bogor justru mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) lahan Taman Panca Karsa pada 2012-2013 lalu.

Berdasarkan hal itu, Oteu mempertanyakan proses sertifikasi lahan tersebut yang dimiliki Pemkab Bogor. Sebab, 16 warga tersebut di saat yang sama memiliki AJB. "Selaku kuasa hukum, kami akan menggugat

lagi ke Pengadilan Negeri Kelas IA Cibinong dengan delik yang berbeda," kata Oteu kepada wartawan, Minggu (31/1).

Dia mengatakan, keterangan Pemkab Bogor yang mengaku melakukan pembebasan lahan tersebut pada 1986 membuat tanda tanya. Passalnya, pada 2004-2005 lalu warga membelinya dengan bukti kepemilikan AJB yang ditandatangani PPA's yaitu Camat Cibinong dan Lurah Tengah.

Sementara itu, Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku sengketa lahan di lokasi Taman Panca Karsa dinyatakan rampung di Pengadilan Negeri Kelas I A Cibinong. "Itu lahan Pemkab Bogor, sudah tidak lagi bersengketa," singkat Ade.

Dia menuturkan, untuk mengantisipasi sengketa serupa terkait aset lahan milik pemerintah daerah, pihaknya berkoordinasi dengan kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor. ● **gio**



IDN/ANTARA

WAKSINASI COVID-19 TAHAP PERTAMA DI CIAMIS

Petugas medis menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac kepada anggota TNI di Puskesmas Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (1/2). Sebanyak 3.842 tenaga kesehatan beserta Prokopimda Ciamis mengikuti vaksinasi tahap pertama serentak di 37 Puskesmas.

Satpol PP Tangkap Penipu yang Meminta Uang pada Pelamar PKWT

BOGOR (IM)- Seorang Ibu rumah tangga berinisial CO, Warga Cimanggu, Tanah Sareal, Kota Bogor ditangkap. Pasalnya, dia diduga melakukan penipuan dalam proses seleksi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) periode 2021, pada Satpol PP Kota Bogor. Pelaku diketahui meminta sejumlah uang kepada beberapa pelamar agar bisa lolos.

Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah mengatakan, penangkapan itu berawal dari laporan pelamar PKWT terkait penipuan tersebut. Petugas lantas menjebak pelaku dengan berpura-pura mengaku ingin melamar menjadi pegawai Satpol PP. "Nah setelah kita jebak, ternyata pelakunya perempuan dan saat ini sudah berhasil kami amankan, setelah ada dua orang korban yang mengadu ke Mako Pol PP," kata Agustian kepada wartawan, Senin (1/2).

Setelah berhasil ditangkap, lanjut Agustian, pelaku CO diketahui meminta uang sebesar Rp 1 juta kepada pelamar PKWT untuk uang pelicin agar lolos seleksi. Kepada korban, pelaku mengaku memiliki relasi dengan pejabat Satpol PP Kota Bogor. "Jadi yang bersangkutan ini (CO) mengaku bahwa bapaknya pejabat di Satpol PP Kota Bogor. Setiap korban

dimintai uang sebesar Rp 1 juta sebagai uang pelicin sekaligus biaya seragam," jelasnya.

Setelah membayar, para korban diberi kwitansi pembayaran oleh pelaku dengan mencatut nama salah satu pejabat Satpol PP. Saat ini, pelaku masih berada dimintai keterangan lebih lanjut oleh petugas. "Pelaku juga mencatut nama pejabat di Pol PP. Sekarang masih dimintai keterangan," ujar Agustian.

Meski demikian, dirinya belum bisa memastikan apakah akan melaporkan kejadian ini pada pihak kepolisian, atau mendamaikan kedua pihak yang dirugikan. Sekaligus mengembalikan uang korban dari pelaku. Agustian juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak percaya jika ada orang tidak dikenal yang mengatasnamakan Satpol PP, apalagi dengan meminta sejumlah uang. "Kami pastikan kalau proses penerimaan PKWT ini sudah sesuai prosedur dan akan dijalkan secara transparan," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam satu hari pendaftaran PKWT pada Satpol PP membludak hingga 3500 pelamar, dari kuota 1000 pelamar. Sehingga pihak Satpol PP pun harus menutup pendaftaran pada hari pertama. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PROGRAM PUSKESMAS TERPADU DAN JUARA DI CIKARANG

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) meninjau fasilitas di Puskesmas Cikarang saat peresmian PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara), Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (1/2). Puskesmas Cikarang dipilih menjadi puskesmas percontohan se-Jawa Barat karena dinilai telah memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan dalam penanganan COVID-19.

TOLAK BANTUAN KEUANGAN DARI KEMENTERIAN

Ade Yasin Anggap Kepala SKPD Luar Biasa Bodoh

"Saya merasa ini luar biasa bodohnya, karena daerah lain malah berlomba-lomba untuk mendapatkan bantuan keuangan tersebut di tengah keterbatasan anggaran Pemkab Bogor dalam penanganan wabah Covid 19, pengendalian Covid 19 dan pemulihan ekonomi," kata Ade Yasin.

CIBINONG (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin kesal dengan salah satu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menolak bantuan keuangan yang diprogramkan oleh Kementerian terkait.

Ia bahkan menganggap Kepala SKPD tersebut bodoh, karena di tengah keterbatasan anggaran Pemkab Bogor dalam penanganan wabah Covid 19, pengendalian Covid 19 dan pemulihan ekonomi, dinas tersebut malah menolak bantuan keuangan program Kementerian terkait.

"Bukannya kreatif dalam mencari sumber pendanaan pembangunan daerah, saya melihat malah ada Kepala

SKPD atau dinas yang menolak bantuan keuangan dari Kementerian atau pemerintah pusat," ungkap Ade Yasin kepada wartawan usai melantik 495 pejabat eselon dua hingga empat di Cibinong, Senin, (1/2).

"Saya merasa ini luar biasa bodohnya karena daerah lain malah berlomba-lomba untuk mendapatkan bantuan keuangan tersebut," imbu Ade Yasin.

"ASN harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan. APBD kita tidak cukup untuk pembangunan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," katanya.

Dia mengaku kecewa saat

ADEYASIN
Bupati Bogor

ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak berani mengambil bantuan keuangan dari pusat dan provinsi.

"Ada dana turun dari pusat dan provinsi ternyata ditolak hanya karena tidak mau pusing menyerap anggarannya," tegasnya.

Ade mengungkapkan, jika ada kesempatan bantuan keuangan, khususnya untuk pemulihan ekonomi, maka harus dikejar. Dan dia meminta SKPD harus berani mengambil risiko.

Ade Yasin menambahkan bakal ada evaluasi dari dirinya

selaku kepala daerah akibat penolakan bantuan keuangan dari Kementerian atau pemerintah pusat ini.

"Evaluasi atau sanksi akan kami berikan karena dia tak mau 'susah' dalam mengurus proses pelaksanaan bantuan keuangan tersebut," tambah Ade Yasin.

Ade Yasin menuturkan di tengah pandemi Covid 19 selain penanganan dan pengendalian wabah Covid 19, kondisi ekonomi makro yang minus, meningkatnya angka kemiskinan dan bertambahnya jumlah pengangguran juga akan diantisipasi

oleh jajarannya.

"Kami tak hanya fokus dalam penanganan dan pengendalian wabah Covid 19 tetapi juga dalam proses pemulihan ekonominya, karena akibat pandemi Covid 19 masyarakat tidak hanya menurun pendapatan tetapi juga kehilangan pekerjaannya," tutur Ade Yasin.

Ade Yasin menjelaskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak wabah Covid 19, salah satu program Pemkab Bogor pada Tahun 2021 dan mendatang ialah satu miliar satu desa (Sami Sade) untuk pembangunan infrastruktur di desa-desa.

"Tiap desa yang mau mendapatkan program Sami Sade kita berikan syarat bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus padat karya dengan melibatkan para warganya," jelas Ade Yasin.

"Kami yakin program ini dapat memulihkan ekonomi masyarakat karena bakal ada ribuan masyarakat desa yang akan mendapatkan honor karena ikut membangun infrastruktur desanya," pungkas Ade Yasin. ● **gio**

Telkom Raih Penghargaan di Ajang BCOMSS

BANDUNG (IM)- PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) meraih penghargaan "Honorable Mention" dalam BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2021.

Penghargaan ini diterima oleh Direktur Human Capital Management Telkom, Afriwandi dalam malam penganugerahan BCOMSS 2021 Jumat (29/1) di Jakarta.

Telkom menerima Penghargaan Honorable Mention dalam kategori Creating Shared Value terhadap program Sampah Jadi Emas dengan kampanye #DaurBikinMakmur yang telah menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga lingkungan hidup di Desa Tuksongo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit adalah ajang di dunia komunikasi perusahaan dan program keberlanjutan bagi perusahaan di lingkungan BUMN.

Direktur Human Capital Management Telkom, Afriwandi mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa langkah dan inisiatif Telkom dalam program keberlanjutan (sustainability).

"Penghargaan ini meru-

pakan bukti komitmen Telkom untuk menjaga lingkungan hidup sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, khususnya selama masa pandemi saat ini.

Honorable Mention ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Telkom untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat," ujar Afriwandi.

Desa Tuksongo merupakan desa yang tidak jauh dari Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, dengan meningkatnya wisatawan setiap tahunnya, sampah yang dihasilkan pun ikut melonjak.

Ada 12 ton sampah yang menumpuk setiap harinya, dan 30-40% dari sampah tersebut adalah plastik. Belum ada upaya maksimal untuk mengurangi sampah plastik di Candi Borobudur dan area sekitarnya.

Di sisi lain, sampah plastik ternyata bisa menjadi keuntungan alternatif bagi masyarakat sekitar, asalkan mereka tahu bagaimana mengolah dan mendaur ulang sampah plastik.

Dengan latar belakang tersebut, terbentuklah inisiatif

dan melalui kolaborasi antara Balkondes Tuksongo binaan Telkom, dapat diwujudkan masyarakat peduli lingkungan dan kreatif dalam permasalahan sampah plastik.

Langkah konkret yang telah dilakukan antara lain meluncurkan program #DaurBikinMakmur, yakni membuat alat yang digunakan untuk mendaur ulang plastik, terdiri dari shredder, injection, dan extrusion - shredder adalah alat yang berfungsi untuk mengubah bongkahan plastik menjadi potongan-potongan kecil, dan mengubahnya menjadi potongan plastik yang sesuai dengan kebutuhan lalu mencetak sampah plastik tersebut menjadi barang baru. Telkom membantu penjualan dan pemasaran barang baru tersebut.

Tak hanya itu, Telkom juga mendorong masyarakat sekitar untuk mengumpulkan sampah plastik yang dibuang wisatawan. Setiap 1 kg sampah plastik yang dikumpulkan warga akan dihargai Rp10 ribu.

Dikatakan Afriwandi, berkat program #DaurBikinMakmur tersebut masyarakat desa menjadi lebih "pintar" dalam pemanfaatan sampah. Saat ini masyarakat sudah mulai melakukan pemilihan sampah secara mandiri. ● **Iys**



Kabupaten Bogor Kembali tanpa Zona Hijau Covid-19

CIBINONG (IM)- Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali menetapkan seluruh wilayahnya tanpa zona hijau penularan Covid-19 pada Minggu (31/1) malam. "Kecamatan Sukamakmur menjadi zona oranye karena terdapat satu orang terdapat suspek," kata Bupati Bogor, Ade Yasin selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor di Cibinong, Bogor.

Sebelum menjadi zona oranye, Kecamatan Sukamakmur sempat berstatus hijau sejak 24 Januari 2021 setelah 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor berstatus zona merah selama enam hari berturut-turut sejak 18 Januari 2021. Penetapan zona merah secara menyeluruh pada setiap kecamatan di Kabupaten Bogor itu merupakan kali pertama selama

pandemi sejak Maret 2020.

Kini, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor mencatat lima kecamatan berstatus zona oranye dan sisanya, 35 kecamatan berstatus zona merah penularan Covid-19. Hal itu disebabkan masih tingginya kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Pada Minggu (31/1), tercatat ada tambahan 90 kasus baru. Hingga kini, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor mencatat 7.862 kasus, dengan rincian 7.209 kasus sembuh, 566 kasus aktif, dan 81 kasus meninggal dunia. "Kabupaten Bogor menerapkan PSBB melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 8 Februari 2021," kata Ade Yasin. ● **gio**

Pemkot Bandung Kaji Kembali Pemberlakuan Cek Poin

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sedang membahas kembali kemungkinan pemberlakuan cek poin di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proposional untuk membatasi mobilitas masyarakat di masa pandemi Covid-19. Terlebih, penyebaran Covid-19 di Bandung meningkat.

Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan, telah mendapatkan arahan dari pemerintah pusat untuk memberlakukan cek poin. Saat ini, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bandung telah diminta untuk membahas hal tersebut bersama pimpinan lainnya.

"Tadi malam kita sudah koordinasi dengan pusat, memang dalam hal ini kalau memungkinkan di kota-kabupaten bisa melaksanakan cek poin di antaranya di terminal, pasar diharapkan seperti itu," ujarnya kepada wartawan, Senin (1/2).

Dia menuturkan, pihaknya masih membahas terkait penentuan titik-titik yang akan dilaksanakan cek poin. Sekaligus memastikan dampak yang timbul dengan adanya kebijakan

tersebut.

"Lagi dibahas dulu cek poin. Nanti dampaknya harus dilihat oleh kita," katanya.

Oded menambahkan, opsi karantina wilayah yang diimbau oleh pemerintah pusat telah dilakukan oleh Pemkot Bandung di tingkat RW. Pihaknya akan melakukan evaluasi terkait kebijakan tersebut untuk memastikan berjalan dengan efektif.

Dia pun mengomentari penyebab PSBB atau PPKM yang dinilai Presiden Joko Widodo tidak efektif. Hal itu terjadi disebabkan terjadinya aktivitas liburan di kalangan masyarakat.

"Amphub tidak amphub (PPKM) memang naik turun yang pasti kita sepakat PSBB atau PPKM proposional. Yang pasti naik turunnya ketika ada kluster libur. Kita minta bagaimana daerah itu agar ketika libur diantisipasi," katanya.

Dia mengatakan, sejumlah kepala daerah saat rapat mengusulkan kepada pemerintah pusat saat acara perayaan Imlek tidak terdapat hari libur. Makanya, beberapa kepala daerah mengusulkan ketika ada libur diantisipasi usulan imlek tidak ada libur. ● **pur**